

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)**

Wayan Vitri Primasari

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), khususnya mengenai perdagangan anak semakin meningkat. Masalah perlindungan anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi dan generasi muda penerus bangsa di masa mendatang, oleh karena itu penulis meneliti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), khususnya mengenai perdagangan wanita dan anak. Pada penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya menggunakan data sekunder. Pada kasus yang diteliti, pelaku perdagangan wanita dan anak melakukan tindak pidana perdagangan anak dan didakwakan dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta didakwakan dengan dakwaan subsidair pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Pelaksanaan pembuktian tersebut dimulai dengan menghadirkan para saksi di muka sidang pengadilan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan terhadap alat bukti ini menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menuangkan hal tersebut dalam surat tuntutan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Dalam pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri Medan bahwa surat dakwaan penuntut umum No. Reg.Perkara: PDM-603/Ep.2/Mdn/07/2012 unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak telah terbukti. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan dakwaannya dengan cermat tetap berpedoman kepada ketentuan yang sah menurut Undang-Undang sehingga mempersempit kesempatan terdakwa untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Namun perlu juga diadakan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang agar lebih lengkap dan merinci secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan anak agar dapat melindungi setiap wanita dan anak yang mulai menjadi lahan bisnis melalui perdagangan orang.

Kata kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Wanita dan Anak, Perlindungan.

**CRIMINAL ACT OF TRADE WOMAN AND CHILDREN
UNDER AGE OF THE LAW NO 21 OF 2007 ON COMBATING
CRIME OF TREADING (CASE OF STUDY NO.
1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)**

Wayan Vitri Primasari

Abstract

Trafficking in Persons (Trafficking), particularly regarding child trafficking is increasing. Child protection issue is very important because children and young people is a potential successor to the nation in the future, therefore, the author examines the case of the Crime of Trafficking in Persons (Trafficking), particularly regarding trafficking in women and children. At the writing of this use of normative legal research methods, which are entirely legal research using secondary data. In the cases studied, traffickers of women and children committed the crime of trafficking in children and were charged with the primary charge of article 2, paragraph (1) About the Eradication of Trafficking in Persons and charged with subsidiary charges of article 83 of The Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Public Prosecutor submitted some evidence presented in court. The evidence presented had qualified legal evidence under the Act. Implementation of such evidence starts by presenting witnesses in court to face questioning in connection with the offenses charged. Examination of the evidence is the basis for the public prosecutor to pour it in the warrant in accordance with the facts revealed at the hearing, in consideration of Medan district court judge's ruling that the indictment the prosecutor No. Reg.Perkara: PDM-603 / Ep.2 / Mdn / 07/2012 the elements of the Crime of Trafficking in Persons and Child Protection has been proven. Therefore the Public Prosecutor should be able to prove the charges carefully still refer to the legal provisions under the Act thus narrowing the defendant an opportunity to escape from the law. However, it should also be held revision of the Law on the Eradication of people to be more complete and detailing the particulars of the crime of trafficking of children in order to protect every woman and child who started to become a commercial enterprise through trafficking.

Keywords: Trafficking in Persons, Women and Children, Protection.